Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus di Desa Panyiuran dan Keramat)

Sahid[1], Muhamad Arsyad[2] , Nor Ainah[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: **hidsahid99@gmail.com**

ABSTRAK

Kajian ini menitikberatkan pada penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 yang melarang praktik buang air besar sembarangan di Kecamatan Amuntai Selatan, khususnya di Desa Panyiuran dan Desa Keramat. Analisis turut dilakukan terhadap beragam aspek yang memengaruhi implementasi regulasi tersebut. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih sebagai metode penelitian. Sebanyak 13 informan yang ditentukan secara purposif menjadi sumber data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sementara itu, triangulasi, perpanjangan masa pengamatan, dan member check diterapkan untuk memvalidasi keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Stop BABS secara umum telah terlaksana cukup optimal. Sebagian besar indikator implementasi menurut model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, seperti kejelasan tugas, koordinasi antarorganisasi, struktur birokrasi, standar operasional prosedur, serta komitmen pelaksana, telah berjalan dengan baik. Namun demikian, keterbatasan anggaran desa masih menjadi kendala utama dalam penyediaan sarana sanitasi, sehingga memengaruhi pencapaian sasaran kebijakan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, kebiasaan buang air besar di sungai, keterbatasan kondisi ekonomi, serta belum optimalnya pengawasan turut menghambat pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, dukungan pemerintah desa, tenaga kesehatan, koordinasi lintas sektor, kegiatan sosialisasi, dan bantuan pembangunan jamban sehat menjadi faktor yang memperkuat implementasi kebijakan tersebut.
Kata Kunci: implementasi kebijakan, Stop BABS, sanitasi lingkungan

ABSTRACT

This research investigates how Hulu Sungai Utara Regency's Regional Regulation No. 4 of 2016 on the Open Defecation Free (ODF) Program has been carried out in Amuntai Selatan District, with particular attention to Panyiuran and Keramat Villages, and seeks to uncover the factors shaping its implementation. The study uses a qualitative descriptive design. Thirteen informants, chosen through purposive sampling, provided data gathered via observation, interviews, and document review. This data was then processed using the stages of reduction, display, and conclusion drawing, while its credibility was safeguarded through triangulation, extended field engagement, and member checking. The findings indicate that the implementation of the Open Defecation Free (ODF) policy has been moderately optimal. Most implementation indicators proposed by Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, including clarity of responsibilities, inter-organizational coordination, bureaucratic structure, standard operating procedures, and implementers' commitment, have been carried out effectively. Nevertheless, limited village budget allocation remains the primary obstacle to providing adequate sanitation facilities, thereby affecting the achievement of policy

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

objectives. In addition, low public awareness, the persistence of open defecation practices in rivers, economic constraints, and inadequate supervision continue to hinder policy implementation. Conversely, support from the village government, healthcare personnel, cross-sector collaboration, continuous public awareness campaigns, and assistance in constructing sanitary latrines have significantly contributed to the successful implementation of the policy.
Keywords: *policy implementation, STOP open defecation, environmental sanitation*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin baik kondisi kesehatan suatu masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai. Selain itu, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penciptaan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan berbagai kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, termasuk di bidang sanitasi lingkungan. Salah satu persoalan sanitasi yang masih menjadi tantangan di Indonesia adalah praktik buang air besar sembarangan (BABS). Perilaku tersebut berpotensi mencemari lingkungan dan meningkatkan risiko penyebaran berbagai penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, tifoid, penyakit kulit, dan hepatitis A. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, sanitasi yang buruk juga menimbulkan kerugian ekonomi akibat meningkatnya biaya pengobatan, menurunnya produktivitas masyarakat, serta rendahnya kualitas lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagai respons terhadap problematika yang ada. Melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, regulasi ini mengupayakan akses sanitasi yang memadai untuk mendorong transformasi perilaku warga menuju pola hidup bersih dan sehat. Partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang terbebas dari praktik buang air besar sembarangan. Program tersebut merupakan perwujudan pilar pertama STBM yang menitikberatkan pada perubahan perilaku komunitas secara swadaya demi kondisi sanitasi yang lebih optimal.

Implementasi kebijakan tersebut telah dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Desa Panyiuran dan Desa Keramat di Kecamatan Amuntai Selatan. Pada periode 2018–2021, Desa Panyiuran memperoleh bantuan pembangunan WC sehat melalui program sanitasi yang didanai oleh APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah rumah tangga yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak sehingga sebagian masyarakat tetap menggunakan jamban tradisional maupun melakukan buang air besar di sungai. Sementara itu, Desa Keramat menerima bantuan pembangunan WC sehat pada tahun 2020. Walaupun sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap WC sehat, perubahan perilaku masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan BABS masih menghadapi berbagai kendala.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Stop BABS di kedua desa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di Desa Panyiuran masih ditemukan sosialisasi kebijakan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, keterbatasan anggaran dalam penyediaan sarana sanitasi, serta masih adanya penggunaan WC cemplung dan jamban yang membuang limbah langsung ke sungai. Sementara itu, di Desa Keramat masih terdapat masyarakat yang mempertahankan kebiasaan buang air besar di sungai karena faktor budaya dan kebiasaan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang belum optimal, serta keterbatasan ekonomi masyarakat yang berdampak pada kemampuan menyediakan fasilitas sanitasi secara mandiri.

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Stop BABS tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, kelembagaan, serta partisipasi masyarakat dalam mengubah perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut untuk

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

mengetahui tingkat keberhasilan implementasi sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Amuntai Selatan, khususnya di Desa Panyiuran dan Desa Keramat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Fajar Noorahman (2020) dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai berjudul *"Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Melalui Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara."* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui Gerakan Stop BABS di Desa Pawalutan belum berjalan secara efektif. Ditinjau dari aspek keberhasilan program, masih terdapat masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan karena belum memiliki jamban sehat serta rendahnya pemahaman mengenai dampak negatif praktik tersebut terhadap kesehatan dan lingkungan. Dari sisi pencapaian tujuan, program belum mampu memenuhi sasaran karena bantuan pembangunan jamban belum menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program masih rendah akibat bantuan dana pembangunan jamban diberikan secara bertahap sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam penyediaan fasilitas sanitasi karena dana desa harus dialokasikan untuk berbagai program pembangunan lainnya. Meskipun demikian, upaya sosialisasi telah dilakukan oleh instansi terkait, sedangkan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dilaksanakan oleh pihak puskesmas dengan dukungan pemerintah desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Era Fita Lumban Gaol (2018) dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara berjudul *"Pelaksanaan Program STBM Melalui Aksi Berjaga dalam Rangka Meningkatkan Kepemilikan Jamban Keluarga dan Perilaku Buang Air Besar Masyarakat di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi."* Identifikasi terhadap hambatan dan permasalahan dalam implementasi program STBM menjadi fokus utama studi ini. Pendekatan kuantitatif dipilih dengan menerapkan metode survei deskriptif sebagai kerangka penelitian. Observasi lapangan digunakan untuk memperoleh data terkait kepemilikan jamban keluarga, sementara wawancara berbasis kuesioner menjadi instrumen pengumpulan informasi tentang praktik buang air besar di kalangan warga. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa 86,8% responden sudah memiliki jamban keluarga. Meskipun demikian, aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat masih berada pada level rendah. Kondisi ini terlihat dari proporsi pengetahuan yang kurang baik mencapai 89,0%, sikap kurang baik sebesar 80,2%, serta tindakan kurang baik sebanyak 96,7%. Rekomendasi yang diajukan peneliti berdasarkan hasil temuan mendorong petugas kesehatan di Puskesmas Tigabaru untuk memperkuat kegiatan penyuluhan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Fokus utama penyuluhan tersebut diarahkan pada kebiasaan buang air besar yang tepat beserta dampaknya terhadap aspek kesehatan dan lingkungan. Masyarakat diharapkan termotivasi untuk menghentikan praktik buang air besar sembarangan melalui pendekatan edukatif ini.

Pandangan Thomas R. Dye (1981) yang dikutip oleh Uddin B. Sore dan Sobirin (2017:50) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan setiap pilihan yang dibuat pemerintah dalam menghadapi persoalan masyarakat, baik melalui tindakan nyata maupun dengan tidak mengambil tindakan tertentu. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak selalu diwujudkan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

dalam bentuk program atau peraturan, melainkan juga dapat berupa keputusan pemerintah untuk tidak melakukan intervensi terhadap suatu permasalahan publik.

Laster dan Stewart Jr, sebagaimana dikutip dalam Reno (2023:28)**,** mengemukakan bahwa implementasi tidak hanya dimaknai sebagai tahapan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sebagai hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan implementasi dapat dievaluasi berdasarkan kualitas proses pelaksanaannya serta tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian terhadap fenomena yang dikaji diperoleh melalui penerapan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dalam studi ini. Kemampuan pendekatan tersebut dalam menyajikan gambaran kondisi lapangan secara utuh berdasarkan fakta dan data yang terkumpul menjadi alasan utama pemilihannya. Berbagai fenomena terkait penerapan kebijakan dapat diinterpretasikan secara kontekstual oleh peneliti berkat penggunaan pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif**,** yaitu penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai objek penelitian. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk mengungkap karakteristik, kondisi, serta hubungan antarfenomena yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan deskripsi yang akurat mengenai implementasi kebijakan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Kegiatan penelitian ini berlangsung di dua desa, yaitu Panyiuran dan Keramat, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Observasi awal menjadi dasar pemilihan kedua desa tersebut karena teridentifikasi sejumlah kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain praktik buang air besar sembarangan yang masih berlangsung serta terbatasnya ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai. Oleh karena itu, kedua desa tersebut dipandang representatif untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya.

Penelitian ini memanfaatkan dua kategori data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi, serta metode lain yang sesuai dengan sasaran studi. Sementara data sekunder bersumber dari bahan yang sudah ada sebelumnya, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen, arsip, laporan lembaga, dan temuan riset sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian. Kedua jenis data tersebut saling melengkapi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses analisis dan penyusunan hasil penelitian (Pasolong, 2016:70).

Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan dalam penelitian ini, di mana penentuan partisipan didasarkan pada kriteria yang relevan dengan tujuan studi. Sebanyak 13 orang menjadi informan dalam penelitian ini. Pemilihan teknik ini bertujuan memastikan data dikumpulkan dari individu yang memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS).

Tiga teknik pengumpulan data diterapkan dalam penelitian ini: observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Gambaran faktual tentang kondisi lapangan diperoleh melalui observasi partisipatif. Sementara itu, wawancara terstruktur dilakukan terhadap para

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

informan untuk mengeksplorasi secara komprehensif pelaksanaan kebijakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Beragam dokumen pendukung seperti peraturan daerah, laporan kegiatan, arsip instansi, dan catatan relevan lainnya dijadikan sumber data dokumenter. Analisis data menggunakan kerangka interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga alur kegiatan: reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Proses analisis berlangsung secara simultan dan berkelanjutan mulai dari tahap pengumpulan data hingga akhirnya diperoleh simpulan yang tepat sasaran sesuai fokus kajian.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Panyiuran dan Desa Keramat)

Tahapan pelaksanaan kebijakan menjadi krusial dalam tata kelola kebijakan publik karena turut menentukan tercapainya sasaran yang dirumuskan. Bukan hanya proses perancangan yang memengaruhi efektivitas sebuah kebijakan, melainkan juga cara kebijakan itu dijalankan di tingkat praktis. Studi ini menerapkan kerangka implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn guna mengkaji penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Pemilihan model tersebut didasari oleh kompleksitas interaksi antarpelaku dan beragam variabel yang terlibat dalam proses implementasi.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

   Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketegasan dalam merumuskan standar dan sasaran yang terukur. Tujuan yang telah ditetapkan akan lebih mudah dicapai oleh pelaksana kebijakan apabila kedua aspek tersebut dirumuskan secara jelas. Potensi perbedaan penafsiran di kalangan pelaksana yang dapat memicu konflik selama proses implementasi justru muncul ketika standar dan sasaran tidak dinyatakan secara eksplisit.

   a. Kejelasan Tugas

      Keberhasilan penerapan Peraturan Daerah mengenai penghentian praktik Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) sangat bergantung pada kejelasan alokasi tugas dalam proses implementasi kebijakan. Setiap individu yang terlibat akan lebih mudah menjalankan fungsi dan kewajibannya apabila pembagian peran telah dirumuskan secara eksplisit. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) menargetkan kondisi desa yang sepenuhnya terbebas dari praktik buang air besar sembarangan dan penggunaan jamban tidak sehat.

      Pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan mayoritas masyarakat telah memahami sasaran kebijakan tersebut berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Puskesmas berperan dalam sosialisasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi, sedangkan pemerintah desa bertugas menyampaikan informasi serta mendukung penggunaan WC sehat kepada masyarakat. Pembagian tugas tersebut didukung oleh koordinasi yang baik antar pelaksana. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang melakukan buang air besar di sungai sehingga upaya pengawasan dan perubahan perilaku perlu terus ditingkatkan. Secara keseluruhan, kejelasan tugas telah mendukung implementasi kebijakan Stop BABS secara optimal.

   b. Sasaran Kebijakan

      Setiap kebijakan perlu memiliki sasaran yang jelas agar pelaksanaannya lebih terarah dan tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif. Dalam implementasi Peraturan Daerah

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), sasaran utama yang ingin diwujudkan adalah tercapainya kondisi desa yang 100% bebas dari penggunaan jamban tidak sehat dan praktik buang air besar sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sasaran kebijakan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) telah dipahami oleh pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan sebagian besar masyarakat. Sasaran kebijakan diarahkan untuk mewujudkan desa yang bebas dari praktik BABS melalui sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat. Meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, secara umum pencapaian sasaran kebijakan di Desa Panyiuran dan Desa Keramat dapat dikategorikan cukup optimal.

2. Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya kebijakan mencakup seluruh elemen pendukung yang esensial bagi keberhasilan implementasi kebijakan dalam mewujudkan sasaran yang telah dirumuskan. Elemen-elemen tersebut terdiri dari personel yang kompeten, alokasi finansial yang cukup, infrastruktur fisik, serta akses terhadap data yang akurat. Kecukupan sumber daya ini berperan signifikan dalam memperlancar proses pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, keterbatasan pada aspek-aspek tersebut justru berpotensi menghambat pencapaian target yang direncanakan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam implementasi kebijakan karena berperan langsung dalam menjalankan setiap tahapan pelaksanaan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kualitas, kompetensi, dan kemampuan para pelaksana dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Panyiuran dan Desa Keramat tergolong cukup optimal. Pemerintah desa, aparatur desa, dan petugas puskesmas telah melaksanakan tugasnya sesuai peran masing-masing serta didukung oleh pembentukan kelompok kerja (pokja) sanitasi. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya pengawasan dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat.

b. Sumber Anggaran

Anggaran menjadi salah satu sumber daya yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dukungan dana yang memadai diperlukan untuk menunjang berbagai kegiatan implementasi agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan secara optimal.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Panyiuran dan Desa Keramat masih menghadapi kendala dari sisi pendanaan yang belum maksimal. Keterbatasan anggaran desa menyebabkan bantuan pembangunan WC sehat belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Selain itu, kondisi ekonomi sebagian masyarakat juga menjadi kendala dalam penyediaan fasilitas sanitasi secara mandiri, sehingga pelaksanaan program menuju 100% bebas BABS belum dapat tercapai secara maksimal.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

3. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antarorganisasi menunjukkan tingkat koordinasi dan kerja sama antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi yang efektif akan mendukung kelancaran implementasi serta meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan.

a. Dukungan Instansi Lain

Keberhasilan implementasi Peraturan Daerah tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) bergantung pada koordinasi dan kerja sama yang baik antarinstansi. Sinergi tersebut diperlukan agar setiap organisasi dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antarorganisasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Panyiuran dan Desa Keramat telah berjalan dengan cukup baik. Koordinasi dan kerja sama antara puskesmas, pemerintah desa, dinas terkait, serta masyarakat diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan pemberian bantuan WC sehat. Meskipun demikian, sinergi antarinstansi masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih optimal.

b. Koordinasi dengan Instansi

Koordinasi merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan publik karena berperan dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas antarinstansi yang terlibat. Koordinasi yang efektif dapat meminimalkan terjadinya kesalahan serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan lebih mudah dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antarinstansi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Panyiuran dan Desa Keramat telah berjalan dengan cukup baik. Koordinasi dilakukan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, puskesmas, pemerintah desa, dan instansi terkait melalui kegiatan sosialisasi, pendataan, penyuluhan, serta monitoring program. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek pengawasan dan kepatuhan sebagian masyarakat terhadap penerapan Stop BABS.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan, tanggung jawab, serta komitmen para pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Karakteristik yang baik akan mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif karena setiap pelaksana mampu menjalankan tugas sesuai dengan peran dan kewenangannya. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme agen pelaksana dalam menjalankan program.

a. Struktur Birokrasi

Karakteristik agen pelaksana mengacu pada kemampuan organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kinerja pelaksana dipengaruhi oleh kompetensi, disiplin, serta kemampuan birokrasi dalam menjalankan prosedur dan menyesuaikan diri dengan tuntutan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik agen pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Panyiuran dan Desa Keramat tergolong cukup baik. Puskesmas dan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

pemerintah desa telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta pembinaan kepada masyarakat. Pelaksanaan program juga didukung oleh pedoman kerja yang jelas, meskipun efektivitas implementasi masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi kendala yang ditemukan di lapangan.

b. SOP (Standar Operasional Prosedur)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman tertulis yang menjadi acuan bagi pelaksana dalam menjalankan setiap tahapan implementasi kebijakan. Keberadaan SOP membantu memastikan bahwa pelaksanaan program berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agen pelaksana dituntut untuk mematuhi prosedur yang berlaku secara konsisten. Sebaliknya, apabila suatu kebijakan tidak disertai dengan ketentuan atau sanksi yang tegas, maka tingkat kepatuhan masyarakat maupun pelaksana cenderung menurun sehingga efektivitas implementasi kebijakan dapat terhambat.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Panyiuran dan Desa Keramat belum berjalan secara optimal. Meskipun puskesmas dan pemerintah desa telah melaksanakan program sesuai prosedur melalui sosialisasi, pemicuan, dan monitoring, pelaksanaannya masih terkendala oleh kebiasaan masyarakat, rendahnya pemahaman terhadap aturan, serta belum diterapkannya sanksi yang tegas. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas implementasi SOP belum sepenuhnya tercapai.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik menjadi faktor eksternal yang memengaruhi implementasi kebijakan. Lingkungan yang kondusif serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah akan mendukung tercapainya tujuan kebijakan secara lebih optimal.

a. Kondisi Sosial

Karakteristik partisipan mengacu pada tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan suatu kebijakan. Partisipasi tersebut tercermin melalui dukungan, kepedulian, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program sehingga dapat memperlancar implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi sosial masyarakat di Desa Panyiuran dan Desa Keramat masih dipengaruhi oleh kebiasaan lama yang menjadikan sungai sebagai tempat buang air besar. Sebagian masyarakat menganggap praktik tersebut lebih mudah dan tidak memerlukan biaya tambahan, sehingga kesadaran untuk menggunakan WC sehat masih belum merata. Meskipun demikian, upaya sosialisasi, pemantauan sanitasi, dan bantuan pembangunan jamban sehat telah mendorong perubahan perilaku di sebagian masyarakat, terutama di Desa Keramat. Secara umum, kondisi sosial dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) dapat dikategorikan cukup optimal, namun peningkatan kesadaran masyarakat masih diperlukan.

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

keberhasilan implementasi kebijakan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi warga, sehingga kondisi ekonomi yang terbatas berpotensi menghambat pencapaian target kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi ekonomi masyarakat di Desa Panyiuran dan Desa Keramat masih menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Keterbatasan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu membangun WC sehat secara mandiri sehingga masih bergantung pada bantuan pemerintah desa. Meskipun demikian, pemerintah desa telah mengalokasikan dana dan memberikan bantuan pembangunan fasilitas sanitasi sebagai upaya mendukung tercapainya program 100% bebas BABS. Secara umum, kondisi ekonomi dalam implementasi kebijakan ini masih tergolong kurang optimal.

c. Kelompok-Kelompok Kepentingan Politik

Kelompok kepentingan dalam konteks ini merujuk pada pihak pemerintah (sektor politik) maupun institusi terkait lainnya yang memiliki tujuan serta kepentingan yang sejalan. Pihak-pihak tersebut kemudian berkolaborasi untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah mengenai penghentian praktik buang air besar sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kedua desa, dapat disimpulkan bahwa kelompok kepentingan politik dalam implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop BABS tidak berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan program di masyarakat. Keberhasilan program lebih dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, meskipun pemerintah tetap berperan penting melalui sosialisasi, pembangunan sarana sanitasi, dan bantuan WC sehat. Dukungan pemerintah desa dan instansi terkait juga membantu kelancaran program, sehingga secara keseluruhan indikator kelompok kepentingan politik dapat dikatakan berjalan cukup baik.

6. Disposisi Implementor

Disposisi implementor dalam pelaksanaan Perda Stop BABS menunjukkan sikap yang positif, karena pemerintah desa dan instansi terkait memiliki komitmen dalam mendukung program melalui sosialisasi, penyediaan fasilitas sanitasi, dan bantuan WC sehat. Secara umum, para pelaksana menerima dan mendukung tujuan kebijakan sehingga implementasi program dapat berjalan cukup baik di kedua desa.

a. Respon Implementor

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, diperlukan adanya respons yang positif dari para pelaksana kebijakan. Respons tersebut penting agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh para implementor.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, respon implementor terhadap Perda Stop BABS di kedua desa tergolong baik. Pemerintah desa, puskesmas, dan masyarakat sama-sama mendukung program melalui sosialisasi, monitoring, dan pendekatan persuasif. Meski begitu, perubahan kebiasaan masyarakat masih membutuhkan waktu. Secara keseluruhan, respon implementor dapat dikatakan optimal karena adanya dukungan dari semua pihak.

b. Pemahaman Pelaksana

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Para agen pelaksana implementasi kebijakan perlu memiliki pemahaman dan pengertian terhadap kebijakan. Dengan adanya hal ini sejauh mana para implementor melaksanakan kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Stop Buang Air Sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, para pelaksana kebijakan di kedua desa telah memahami isi dan tujuan Perda Stop BABS dengan baik. Pemahaman ini terlihat dari pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sanitasi sehat. Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang kurang merespons, secara keseluruhan indikator pemahaman pelaksana dapat dikatakan optimal.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Panyiuran dan Keramat)

1. Faktor Penghambat
   a. Kurangnya Pemahaman Aturan

      Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sasaran kebijakan masih belum optimal, karena masih terdapat warga yang belum mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut. Kondisi ini menyebabkan tujuan dari kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat.

   b. Kurangnya Memahami SOP

      Berdasarkan hasil wawancara di kedua desa, penerapan SOP dalam implementasi Perda Stop BABS belum berjalan optimal. Meskipun prosedur STBM sudah ada dan digunakan oleh puskesmas serta pemerintah desa, pelaksanaannya masih terhambat oleh kebiasaan masyarakat yang lama melakukan BABS di sungai atau jamban. Selain itu, sebagian aparatur desa belum memahami SOP secara detail sehingga penerapannya di lapangan belum maksimal, ditambah belum adanya sanksi tegas bagi pelanggar.

   c. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

      Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penerapan Perda tentang BABS masih belum berjalan optimal karena masih banyak masyarakat yang melakukan BAB di sungai. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat serta kebiasaan lama yang sudah melekat dalam menggunakan jamban di sungai.

   d. Keterbatasan Ekonomi

      Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam implementasi Perda Stop BABS. Mayoritas warga bekerja sebagai petani, buruh, dan nelayan dengan penghasilan yang tidak tetap sehingga kesulitan membangun WC sehat secara mandiri. Sebagian masyarakat juga masih bergantung pada bantuan pemerintah desa untuk penyediaan fasilitas sanitasi. Meski demikian, pemerintah desa telah berupaya mengalokasikan anggaran untuk membantu pembangunan WC sehat bagi warga kurang mampu guna mendukung tercapainya program 100% bebas BABS.

   e. Keterbatasan Anggaran

      Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sumber anggaran dalam implementasi Perda Stop BABS di kedua desa masih belum optimal. Anggaran pembangunan dan bantuan WC sehat masih bergantung pada dana desa dengan jumlah

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

yang terbatas, sehingga belum semua masyarakat dapat menerima bantuan tersebut. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga menyebabkan sebagian warga belum mampu membangun WC secara mandiri.

f. Kurangnya Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam implementasi Perda Stop BABS di kedua desa sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan pemerintah desa, aparatur desa, dan UPT Puskesmas Amuntai Selatan dalam melaksanakan kebijakan serta memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan BABS di sungai maupun jamban. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pengawasan serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan penggunaan WC sehat.

2. Faktor Pendukung

a. Adanya Kejelasan Tugas

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kejelasan tugas dalam implementasi Perda Stop BABS di kedua desa sudah cukup baik. Pihak puskesmas menjalankan perannya dalam sosialisasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Pemerintah desa dan aparatur juga memahami tugasnya dalam menyampaikan informasi, memberikan imbauan, serta mendukung penggunaan WC sehat. Masyarakat pun sudah mengetahui adanya program ini melalui sosialisasi, meskipun masih ada yang tetap melakukan BABS karena faktor kebiasaan.

b. Dukungan Instansi

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dukungan instansi lain dalam implementasi Perda Stop BABS di kedua desa sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kerja sama antara puskesmas, pemerintah desa, dinas kesehatan, dinas PU, dan masyarakat dalam mendukung program melalui sosialisasi, pendataan, serta bantuan WC sehat. Meskipun demikian, sinergi antarinstansi tersebut masih belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya.

c. Koordinasi Instansi Terkait

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam implementasi Perda Stop BABS di kedua desa sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui kerja sama antara puskesmas, pemerintah desa, kecamatan, dan dinas terkait dalam bentuk sosialisasi, pendataan, penyuluhan, serta pertemuan lintas sektor untuk mendukung program 100% bebas BABS. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pengawasan dan masih adanya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perda tersebut.

d. Adanya Respon Implementor

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa respon implementor terhadap Perda Stop BABS di kedua desa secara umum sudah cukup baik. Pemerintah desa, aparatur desa, puskesmas, dan masyarakat sama-sama mendukung kebijakan ini karena dinilai penting untuk kesehatan dan kebersihan lingkungan. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan waktu, terutama dalam mengubah kebiasaan masyarakat yang masih melakukan BAB di sungai, serta perlu peningkatan komitmen dan pengawasan agar program dapat berjalan lebih optimal.

e. Adanya Pemahaman Pelaksana

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan di kedua desa telah memahami isi, tujuan, dan maksud Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop BABS. Pihak puskesmas, pemerintah desa, dan aparatur desa mengetahui bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, serta mencegah pencemaran sungai akibat perilaku BABS. Pemahaman tersebut juga tercermin dari pelaksanaan tugas melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya sanitasi yang sehat kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus di Desa Panyiuran dan Desa Keramat), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya secara umum telah berjalan cukup baik meskipun belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek implementasi yang menunjukkan adanya upaya serius dari para pelaksana kebijakan dalam menjalankan program. Dari sisi kejelasan tugas, sudah terdapat pembagian peran yang cukup jelas antara puskesmas, pemerintah desa, dan aparatur desa dalam menjalankan kegiatan sosialisasi, pembinaan, serta monitoring kepada masyarakat. Pada aspek pemahaman tujuan kebijakan, sebagian besar pelaksana dan masyarakat sudah mengetahui bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, menciptakan lingkungan yang bersih, serta mengurangi pencemaran akibat perilaku BABS. Dari aspek sumber daya manusia, ketersediaan tenaga pelaksana sudah cukup memadai, baik dari unsur pemerintah desa maupun tenaga kesehatan, meskipun masih perlu peningkatan dalam pengawasan dan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, dukungan dari instansi lain serta koordinasi antar lembaga seperti puskesmas, kecamatan, dan dinas terkait juga berjalan cukup baik dan membantu memperlancar pelaksanaan program. Struktur birokrasi yang ada pun sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan kebijakan memiliki dasar yang jelas. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran bantuan WC sehat, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah, kebiasaan lama masyarakat yang sulit diubah, serta penerapan SOP yang belum sepenuhnya optimal. Meskipun demikian, respon serta pemahaman para implementor terhadap kebijakan ini tergolong positif, karena pemerintah desa, puskesmas, dan masyarakat secara umum mendukung program Stop BABS meskipun masih memerlukan proses penyesuaian yang berkelanjutan.

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Amuntai Selatan terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung meliputi adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab antar instansi dari tingkat pemerintah daerah hingga desa, dukungan aktif dari puskesmas serta instansi teknis terkait, serta adanya koordinasi lintas sektor yang cukup baik dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, pendataan, dan monitoring berkala. Selain itu, tersedianya bantuan pembangunan WC sehat melalui dana desa dan program kesehatan lingkungan juga menjadi salah satu faktor penting yang membantu masyarakat dalam meningkatkan akses sanitasi. Respon positif dari aparat desa, tenaga kesehatan, serta sebagian besar masyarakat turut memperkuat keberhasilan program ini di lapangan. Di sisi lain, faktor penghambat yang masih ditemukan cukup beragam, di antaranya rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, masih kuatnya kebiasaan lama BAB di sungai yang sudah berlangsung lama secara turun-temurun, serta keterbatasan kondisi ekonomi masyarakat yang menyebabkan sebagian warga belum mampu membangun WC secara mandiri. Selain itu, keterbatasan anggaran pemerintah desa dalam menyediakan bantuan sanitasi secara merata juga menjadi kendala, ditambah lagi dengan belum optimalnya pengawasan dan penerapan SOP di lapangan serta belum adanya pengawas khusus yang secara konsisten melakukan pemantauan berkelanjutan. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun implementasi program sudah berjalan, masih diperlukan penguatan dalam aspek pengawasan, pendanaan, serta perubahan perilaku

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

masyarakat agar tujuan akhir program yaitu desa bebas BABS dapat tercapai secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Anonim (2016) *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)*. Amuntai: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Lumban Gaul, E.F. (2018) *Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Melalui Aksi Berjaga Dalam Rangka Meningkatkan Kepemilikan Jamban Keluarga dan Perilaku Buang Air Besar Masyarakat di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi*.

Moh. Fajar Noorahman, M.F. (2020) *Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Melalui Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Pasolog, H. (2016) *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sore, U. B., & S. (2017) *Kebijakan Publik*. Makassar: Sah Media.